



• Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun melalui kartu Pra Kerja. Kartu Pra Kerja akan diwariskan mampu menekan angka PHK.
 • Karyawan harus mengisi formulir data diri dan tempat bekerja saat ini.
 • Setelah itu, mereka akan mendapat notifikasi jika kartu Pra Kerja sudah dapat digunakan.
 • Ada tiga tahap dalam program tersebut.
 • Tahap awal pada bulan April kali ini, ada 14.055 karyawan. Dana akan ditransfer langsung kepada pemilik kartu.
 • Berserta yang dikurikan untuk satu pekerjaan, informasinya mencapai Rp3.550.000.
 • Dana ada yang bisa dicairkan dan ada yang tidak karena sebagian digunakan untuk biaya pelatihan.

Kepala

Ribuan Karyawan Bakal Terima

● Sambungan Hal 9

mengisi formulir data diri dan tempat bekerja saat ini. Setelah itu, mereka akan mendapat notifikasi jika kartu Pra Kerja sudah dapat digunakan," ujarnya, Selasa (7/4).

Ada tiga tahap dalam program tersebut. Tahap awal pada bulan April kali ini, ada 14.055 karyawan. Berdasarkan data 307 perusahaan terdampak dalam situasi pandemi Covid-19. Terdiri dari 11 perusahaan yang menerapkan PHK ke 258 orang, kemudian terdapat 296 perusahaan yang merumahkan 13.797 karyawannya.

"Itu *update* tahap awal bulan 3 April kemarin dan saat ini masih terus berjalan. Ba-

tasnya kalau pemerintah pusat itu menjadwalkan tanggal 9 bulan ini," ujarnya.

Terkait skema penyaluran, Bowo masih belum mengetahui secara pasti. Namun, kemungkinan besar dana tersebut akan ditransfer langsung kepada pemilik kartu. Besaran yang dikeluarkan untuk satu pekerja, informasinya mencapai Rp3.550.000.

"Kalau pastinya saya belum tahu. Karena itu langsung dari pemerintah pusat. Yang jelas dana itu nantinya ada yang bisa dicairkan dan ada yang tidak karena sebagian digunakan untuk biaya pelatihan," ungkapnya.

Sementara bagi pekerja informal, Pemda DIY masih belum menentukan langkah yang akan diambil. Jumlah pekerja informal mencapai 474 orang. Namun, pihaknya sudah menyampaikan

kepada dinas-dinas yang ada di Kabupaten/Kota supaya memberi arahan kepada pekerja informal untuk mengisi formulir data diri.

"Karena dana tersebut se-Indonesia. Jadi tiap provinsi harus segera mengirim secepat-cepatnya, supaya bisa segera disalurkan," kata dia.

Rencananya, pemerintah pusat bakal berlakukan Kartu Pra Kerja tersebut selama tiga bulan ke depan dimulai sejak bulan April ini.

Beri pelatihan

Sekda DIY Kadarman Baskara Aji menjelaskan bahwa bagi pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan akan diberikan pelatihan serta biaya hidup yang bersumber dari pusat. Harapannya setelah pandemi berakhir, mereka siap kembali ke dunia kerja.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disna-

kertrans) DIY, dijelaskan Aji, telah melakukan pendataan kepada mereka yang berhak menerima bantuan tersebut. "Mereka (Disnakertrans) melakukan pendataan itu. Nanti hasilnya dilaporkan ke Jakarta dan akan diberikan Jakarta. Pelatihan akan diberikan secara *online*," ujarnya.

Aji mengatakan, bahwa mereka yang mengalami PHK maupun dirumahkan, otomatis tidak akan memiliki pendapatan. Terlebih bagi mereka yang telah berkeluarga, mereka membutuhkan penghasilan untuk bisa menghidupi anggota keluarga yang lain.

"Melalui bantuan ini juga untuk menyiapkan mereka seussai Covid-19 akan memiliki keahlian dan siap untuk kembali bekerja. Llau selama dia pelatihan, mereka dibantu dana untuk mereka hidup," ucapnya. (hda/kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005